

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Selatan**

Bengkulu Selatan adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 1949 Nomor GB/27/1949 tentang pengangkatan Baksir sebagai Bupati Bengkulu Selatan (sebelumnya bernama Kabupaten Manna Kaur 1945–1948 dan Kabupaten Seluma Manna Kaur 1948–1949). Pada perkembangan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan Presiden RI tanggal 14 November 1956 dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Tambahan Lembaran Negara 109). Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat tanggal 7 Juni 2005, dikuatkan oleh Perda No. 20 tanggal 31 Desember 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 13 Tanggal 2 Januari 2006 Seri C maka tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang- undang Nomor: 03 Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kaur, Seluma dan Bengkulu Selatan.

#### **4.2 Laporan Realisasi Anggaran**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Hadi, 2010: 30).

Setiap tahunnya anggaran pemerintah daerah tersebut diakumulasi untuk melihat jumlah besaran dana yang diterima dan dikeluarkan untuk keperluan pemerintah daerah dan juga pembangunan daerahnya, baik dari segi pendapatan maupun segi pengeluaran. Adapun uraian dari pendapatan tersebut dapat dilihat dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima. Untuk uraian pengeluaran dapat dilihat dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Sehingga dari sana dapat diketahui surplus atau defisit dari anggaran Pemerintah daerah setiap tahunnya.

**Tabel 4.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Periode 2008 ,2009,dan 2010**

Uraian	Realisasi Tahun (Rp)		
	2008	2009	2010
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	12.773.550.718,50	22.042.030.166,95	11.894.036.693,62
<b>Pendapatan Transfer</b>	359.068.454.469,13	345.473.061.746,47	369.343.440.437,80
<b>Belanja Operasi</b>	256.671.611.628,13	297.377.172.426,00	349.930.177.263,36
<b>Belanja Modal</b>	404.531.425.106,99	74.103.206.985,00	44.997.459.154,00
<b>Belanja Tak Terduga</b>	817.973.772,00	3.091.744.375,00	1.510.464.000,00
<b>Surplus/Defisit</b>	(286.179.005.319,49)	(7.057.031.872,58)	(1.470.349.247,94)

Sumber data: Buku APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2008 – 2010

**Tabel 4.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Periode 2011 dan 2012**

Uraian	Realisasi Tahun (Rp)	
	2011	2012
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	14.758.401.174,70	18.911.016.577,54
<b>Pendapatan Transfer</b>	459.219.736.125,78	540.927.127.317,98
<b>Belanja Operasi</b>	399.315.419.775,00	457.874.992.461,00
<b>Belanja Modal</b>	76.175.630.262,95	81.760.404.114,00
<b>Belanja Tak Terduga</b>	1.254.986.955,00	47.846.000,00
<b>Surplus/Defisit</b>	(2.767.849,692,47)	20.877.315.076,90

Sumber data: Buku APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2011 - 2012

### **4.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

#### **4.3.1 Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

#### **4.3.2 Pajak Rumah Makan**

Pajak rumah makan adalah pajak atas pelayanan ditempat rumah makan tersebut. Umah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa catering.

### **4.3.3 Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dan dibaca.

### **4.3.4 Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

### **4.3.5 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan galian golongan c yang terdapat di Bengkulu Selatan adalah: Pasir, kerikil, dan batu hias.

### **4.3.6 Pajak Parkir**

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

#### **4.3.7 Pajak Air Tanah**

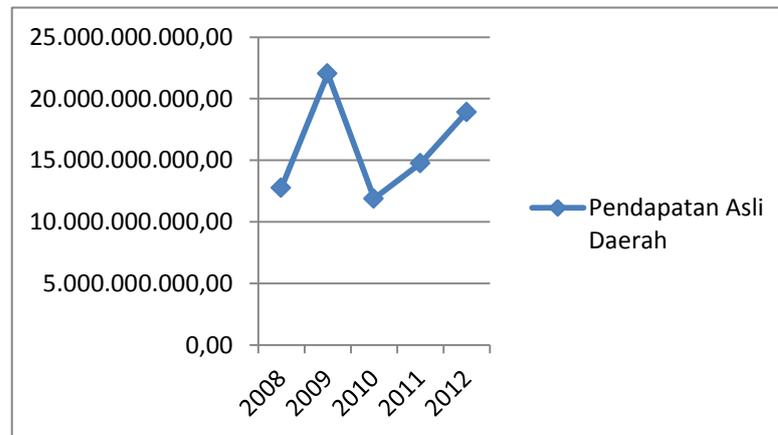
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan pertanian dan perikanan rakyat seperti yang banyak terdapat di Kecamatan Seginim dan Kecamatan Air Nipis yang banyak terdapat kolam air deras yang berisi kolam ikan.

Sumber – sumber pendapatan asli daerah di atas merupakan acuan pemerintah daerah dalam menetapkan target PAD yang akan dicapai setiap tahunnya. Adapun realisasi Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam lima tahun terakhir periode 2008 – 2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Pendapatan Asli Daerah Periode Tahun 2008 – 2012**

Tahun	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2008	12.773.550.187,50
2009	22.042.030.166,95
2010	11.894.036.693,62
2011	14.758.401.174,70
2012	18.911.016.577,54

**Gambar 4.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Bengkulu Selatan Tahun 2008 - 2012**



Gambar di atas menunjukkan tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak stabil dalam perolehannya selama lima tahun terakhir yaitu pada periode 2008 - 2012. Untuk melihat kinerja dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan.

#### **4.4 Analisis Data**

##### **a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dihitung sebagai berikut:

65

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

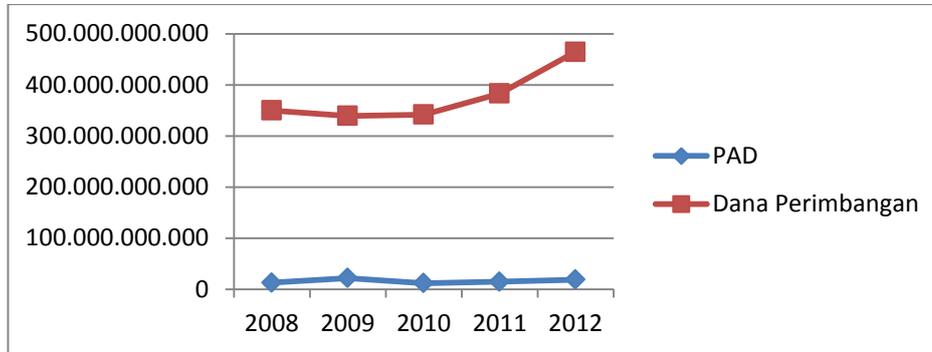
**Tabel 4.4**  
**Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

Keterangan Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian
2008	12.773.550.187,50	350.017.783.050,00	<b>3.65%</b>
2009	22.042.030.166,95	339.328.028.084,00	<b>6.50%</b>
2010	11.894.036.693,62	341.655.587.953,00	<b>3.48%</b>
2011	14.758.401.174,70	382.925.770.693,00	<b>3.85%</b>
2012	18.911.016.577,54	464.456.933.976,00	<b>4.07%</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2013 (Lampiran)

Pada tabel di atas, dapat dilihat dan diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemkab Bengkulu Selatan dalam lima tahun terakhir (2008-2012). Pada periode tahun 2008 rasio kemandirian yang dihasilkan yaitu sebesar 3.65%. Pada periode tahun 2009 rasio kemandirian mengalami kenaikan sebesar 2,85% sehingga menjadi 6.50%. Pada periode tahun 2010 rasio kemandirian turun sebesar 3,02% sehingga menjadi 3.48%. Pada periode tahun 2011 rasio kemandirian mengalami kenaikan sebesar 0,37% sehingga menjadi 3,85%. Dan pada periode tahun 2012 rasio kemandirian mengalami kenaikan sebesar 0,22% sehingga menjadi 4,07%.

**Gambar 4.2**  
**Grafik Rasio Kemandirian Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**



Pada grafik gambar 4.2 di atas terlihat jelas perbedaan yang sangat jauh dari jumlah total dana bantuan pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dana bantuan dari pusat yang terus meningkat tidak diikuti dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang tidak stabil realisasinya.

**Tabel 4.5**  
**Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian**  
**dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegarif

Sumber: Halim, 2004 dalam Ruserlistyanti, 2013

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio kemandirian Pemda Kabupaten Bengkulu selatan ini menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat rendah sekali. Atau termasuk kedalam pola hubungan yang Instruktif yang berarti peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian

Pemerintah Daerah (daerah tidak mampu melaksanakan Otonomi Daerah). Terlihat dari hasil perhitungan yang ada dari tahun 2008 sebesar 3.65%, tahun 2009 sebesar 6.50%, tahun 2010 sebesar 3.48%, tahun 2011 sebesar 3.85%, dan tahun 2012 sebesar 4.07%, sangat jauh dari standarisasi keuangan yang ada. Yang berarti pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pusat.

**b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Hasil perhitungan rasio efektifitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):

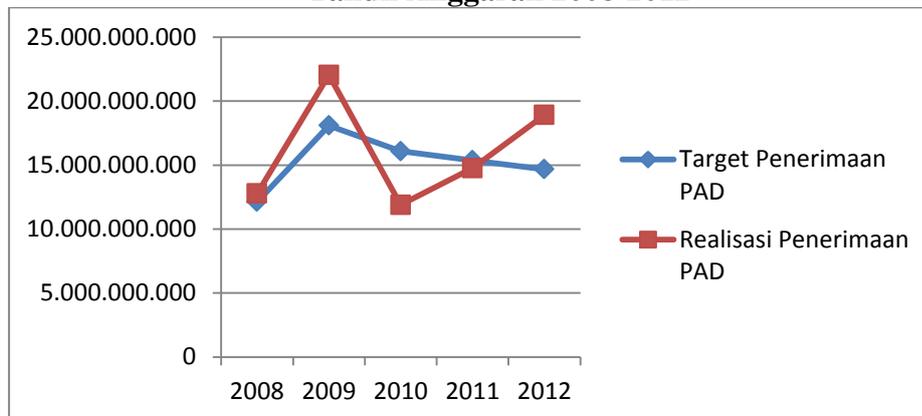
**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

<b>Keterangan Tahun</b>	<b>Target Penerimaan PAD</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD</b>	<b>Rasio Efektifitas</b>
2008	12.124.890.765,00	12.773.550.718,50	<b>105,35%</b>
2009	18.084.688.988,00	22.042.030.166,95	<b>121,88%</b>
2010	16.080.433.967,00	11.894.036.693,62	<b>73,97%</b>
2011	15.366.203.760,00	14.758.401.174,70	<b>96,04%</b>
2012	14.669.257.351,56	18.911.016.577,54	<b>128,92%</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2013 (Lampiran)

Pada tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemkab Bengkulu Selatan dalam lima tahun terakhir (2008-2012). Pada periode tahun 2008 rasio efektifitas sebesar 105,35%. Pada periode tahun 2009 rasio efektifitas mengalami kenaikan sebesar 16,53% sehingga menjadi 121,88%. Pada periode tahun 2010 rasio efektifitas mengalami penurunan sebesar 47,92% sehingga menjadi 73,9%. Pada periode tahun 2011 rasio efektifitas mengalami kenaikan sebesar 22,08% sehingga menjadi 96,04%. Pada periode tahun 2012 rasio efektifitas mengalami kenaikan sebesar 32,88% sehingga menjadi 128,92%.

**Gambar 4.3**  
**Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**



Pada grafik gambar 4.3 di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak stabil walaupun dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun dilihat dari grafik tersebut diketahui bahwa target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya justru menurun dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

**Tabel 4.7**  
**Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Kriteria	Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	<75

Sumber: Halim, 2004 dalam Ruserlistyanti, 2013

Berdasarkan Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2008-2012 menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Ini terlihat dari perhitungan rasio efektifitas yang dari tahun 2008 sebesar 105,35%, tahun 2009 sebesar

121,88%, tahun 2010 sebesar 73,97%, tahun 2011 sebesar 96,04%, dan pada tahun 2012 sebesar 128,92%. Sesuai dengan kriteria efektifitas yang ada, terdapat tiga tahun dalam periode 2008 – 2012 yang menyentuh angka lebih dari 100% yaitu pada periode tahun 2008, 2009, dan 2012 yang berarti pada tahun tersebut efektifitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan pada periode tahun 2011 rasio efektifitas yang dihasilkan sebesar 96,04% yang berarti masuk dalam kriteria efektif, Hanya pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi sebesar 73,97% yang berarti pada tahun tersebut masuk dalam kriteria kurang efektif.

**c. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

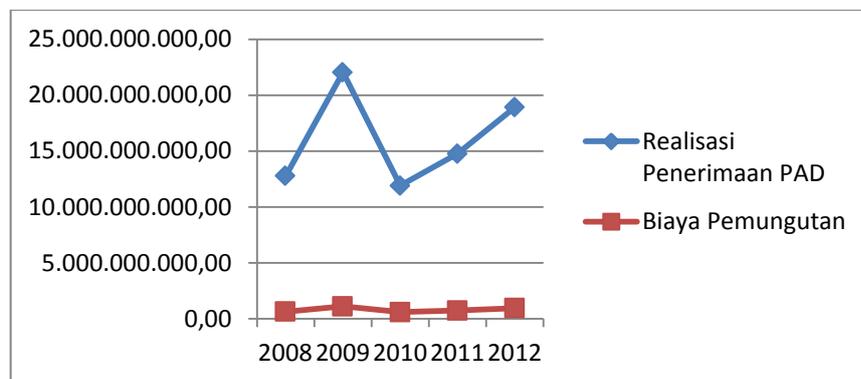
**Tabel 4.8**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

<b>Keterangan</b> <b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b> <b>PAD</b>	<b>Biaya Pemungutan</b> <b>PAD</b>	<b>Rasio</b> <b>Efisiensi</b>
2008	12.773.550.718,50	603.677.535,92	<b>4,72%</b>
2009	22.042.030.166,95	1.001.102.508,34	<b>4,54%</b>
2010	11.894.036.693,62	549.107.438,68	<b>4,61%</b>
2011	14.758.401.174,70	730.290.058,74	<b>4,94%</b>
2012	18.911.016.577,54	915.505.828,88	<b>4,84%</b>

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013 (Lampiran)

Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efisiensi PAD Pemkab Bengkulu Selatan dalam lima tahun terakhir (2008-2012). Pada tahun 2008 berada di angka 4,72%. Pada tahun 2009 turun menjadi 4,54%, pada tahun 2010 naik menjadi 4,61%. Pada tahun 2011 naik kembali menjadi 4,94% dan pada tahun 2012 turun menjadi 4,84%.

**Gambar 4.4**  
**Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**



Pada grafik gambar 4.4 di atas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah yang tidak stabil namun dari grafik tersebut dapat dilihat besar kecilnya jumlah PAD yang diterima tidak mempengaruhi biaya pungutan yang dilakukan oleh petugas penarik pajak daerah tersebut.

**Tabel 4.9**  
**Efisiensi Keuangan Daerah**

<b>Efisiensi Keuangan Daerah</b>	<b>Rasio Efisiensi (%)</b>
Sangat Efisien	<5
Efisien	>5 – 10
Cukup Efisien	>11 – 20
Kurang Efisien	>21 – 30
Tidak Efisien	>30

Sumber: Halim, 2004 dalam Ruserlistyanti, 2013

Berdasarkan Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2008-2012 menggambarkan kemampuan Pemda dalam mengefisiensikan PAD sesuai dengan kriteria efisiensi keuangan daerah yang pada tahun 2008 berada di angka 4,72%. Pada tahun 2009 turun menjadi 4,54%, pada tahun 2010 naik menjadi 4,61%. Pada tahun 2011 naik kembali menjadi 4,94% dan pada tahun 2012 turun menjadi 4,84%. Ini menandakan bahwa Pemda Bengkulu Selatan mampu meminimalisir biaya upah pungut dalam merealisasikan PAD setiap tahunnya.

**d. Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan

yang dicapai dari setiap periode. Rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t_1} - \text{PAD}_{t_0}}{\text{PAD}_{t_0}}$$

$t_1$  = Awal tahun

$t_0$  = Akhir Tahun

**Tabel 4.10**  
**Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun Anggaran 2008-2012**

<b>Keterangan</b> <b>Tahun</b>	<b>PAD<sub>t0</sub></b>	<b>PAD<sub>t1</sub></b>	<b>Rasio</b> <b>Pertumbuhan</b>
2008-2009	12.773.550.718,50	22.042.030.166,95	<b>72,56%</b>
2009-2010	22.042.030.166,95	11.894.036.693,62	<b>-46,04%</b>
2010-2011	11.894.036.693,62	14.758.401.174,70	<b>24,08%</b>
2011-2012	14.758.401.174,70	18.911.016.577,90	<b>28,14%</b>

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013 (Lampiran)

Pada tabel 4.12 di atas, hanya ada satu periode dalam lima tahun terakhir (2008-2012) di mana rasio pertumbuhan Pemkab Bengkulu Selatan negatif, yaitu pada tahun 2009-2010 sebesar -46,04%. Adapun rasio pertumbuhan yang mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2009-2010 sebesar -46,04% naik menjadi 24,08% tahun 2010-2011, kemudian naik menjadi 28,14% pada tahun 2011-2012.

Semakin meningkatnya pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun menandakan semakin tumbuhnya pembangunan di daerah tersebut sehingga semakin banyak juga pemasukan yang di dapat oleh Pemerintah Daerah

kabupaten Bengkulu selatan, walaupun sempat terjadi penurunan yang signifikan pada periode tahun 2009 – 2010 hingga menyentuh -46,04% namun untuk periode tahun 2010 – 2011 dan 2011 – 2012 pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan meningkat dari 24.08% menjadi 28,14%.

## **4.5 Pembahasan**

### **4.5.1 Kemandirian Keuangan Daerah**

Halim (2005), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Hasil penelitian dari perhitungan rasio kemandirian Pemda Kabupaten Bengkulu selatan ini pada gambar 4.2 menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat rendah sekali. Karena tingkat kemandirian di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2008 berada di angka 3.65%, pada tahun 2009 naik menjadi 6.50%, pada tahun 2010 turun kembali menjadi 3.48%, pada tahun 2011 naik menjadi 3.85%, dan kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 4.07% berdasarkan pola kemandirian menurut Halim (2004). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang menyatakan bahwa Kabupaten Aceh Selatan masih dalam kriteria sangat kurang mandiri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan pembangunan. Kemandirian berarti mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya sendiri dari pada bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah dan ketergantungan bantuan terhadap pihak eksternal semakin rendah.

Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta lemahnya pengelolaan pemerintah terhadap kekayaan daerah yang tidak produktif sehingga tidak dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal, Usman (2011). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi sangat besar. Terlebih

lagi pada pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain – lain yang sah yang belum stabil karena setiap tahunnya pada dua sumber pendapatan tersebut selalu mengalami penurunan maupun kenaikan yang berdampak pada PAD Kabupaten Bengkulu Selatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat bergantung dengan bantuan dari dana perimbangan atau bantuan dari pemerintah pusat. Ini dikarenakan Kabupaten Bengkulu Selatan belum mampu membiayai sendiri kegiatan dan pembangunan di daerahnya sendiri. Kabupaten Bengkulu Selatan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat yang cukup besar dan hanya dapat mengumpulkan pendapatan yang yang belum maksimal.

#### **4.5.2 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Halim (2004) rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah yang ada sudah sangat efektif. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Hasil perhitungan dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2008 – 2012 pada tabel 4.6, menggambarkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan sudah dapat mencapai target yang berarti sangat efektif sesuai dengan kriteria efektifitas yang ada karena telah dapat mencapai lebih dari 100%, walaupun pada periode 2010 masuk

dalam kriteria yang tidak efektif karena rasio efektifitasnya menyentuh angka 73,9%, di bawah kriteria efektifitas yang efektif menurut Halim (2004). Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan dengan anggaran/target yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan dan jika dilihat capaian bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, ini berarti bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dari capaian/realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun yang bersangkutan sehingga kondisi keuangan pemerintah dikategorikan tidak efektif, Usman (2011). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fino (2011) bahwa tingkat efektifitas keuangan daerah Kabupaten Agam selama tiga tahun anggaran yaitu sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan menurut skala penghitungan yang menunjukkan kriteria sangat efektif, yaitu berada pada persentase  $>100\%$  pada tahun anggaran 2008 dan 2009 namun tidak efektif pada tahun anggaran 2010.

Hal ini berarti menunjukkan kinerja yang positif bagi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan. Kemampuan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meraup PAD yang telah ditargetkan menandakan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih memiliki banyak sumber PAD yang apabila bisa dioptimalkan dengan baik dapat membantu tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut masih terlalu kecil, bahkan setiap tahunnya target penerimaan PAD

tersebut bukannya semakin meningkat justru semakin menurun. Ini satu hal yang sangat disayangkan karena dari perhitungan yang rasio efektifitas terdapat tiga periode yaitu pada tahun 2008, 2009, dan 2012 yang dapat mencapai angka di atas seratus persen yang menandakan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan PAD yang ada apabila didukung oleh kinerja pemerintah daerah.

#### **4.5.3 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Halim (2004), efisiensi adalah tingkat perbandingan antara masukan (*input*) dengan hasil (*output*) yang dicerminkan dalam rasio atau perbandingan diantara keduanya. Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dikatakan tidak efisien. Jadi tinggi rendahnya efisien ditentukan oleh besar kecilnya rasio yang dihasilkan. Rasio Efisiensi PAD, dalam merealisasikan PAD tentunya dikeluarkan biaya-biaya, hal ini akan menggambarkan kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan yang diimbangi dengan biaya yang memenuhi batas kewajaran.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tabel 4.8 di atas bahwa menunjukkan kinerja yang sangat efisien karena sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan biaya pungutan maksimal sebesar 5% untuk kabupaten/kota berarti menunjukkan kinerja yang sangat efisien. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fino (2011) pemerintah daerah Kota Padang menunjukkan kinerja yang sangat baik dan efisien dalam pemungutan sumber pendapatannya. Karena realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima

lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut PAD tersebut.

Jadi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sangat baik dan efisien dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerahnya. Ini berkat kinerja yang baik antara petugas penarik pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah serta petugas penarik pajak di setiap Kecamatan di Bengkulu Selatan yang berkerjasama membantu pemerintah daerah untuk memungut PAD di Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena realisasi PAD yang diterima lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut PAD tersebut. Ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sangat mengoptimalkan pendapatan yang didapat dengan mengeluarkan pungutan sekecil – kecilnya.

#### **4.5.4 Rasio Pertumbuhan**

Halim (2005), rasio pertumbuhan adalah untuk mengetahui komponen-komponen (Pendapatan, PAD, Belanja, Belanja Rutin dan sebagainya) mana yang perlu mendapatkan perhatian sebaiknya melihat terlebih dahulu pertumbuhan komponen-komponen tersebut. Selain ini rasio pertumbuhan ini akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Sebaiknya pertumbuhan ini dinyatakan dalam bentuk persentase

Penghitungan rasio pertumbuhan pada tabel 4.10 di atas diketahui bahwa laju pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada posisi baik karena tingkat laju pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkulu Selatan terus

mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan. Dapat dilihat dari tahun (2008-2012) di mana rasio pertumbuhan Pemkab Bengkulu Selatan negatif, yaitu pada tahun 2009-2010 sebesar -46,04%. Adapun rasio pertumbuhan yang mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2009-2010 sebesar -46,04% naik menjadi 24,08% tahun 2010-2011, kemudian naik menjadi 28,14% pada tahun 2011-2012. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Fino (2011) yang menunjukkan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Agam pada tahun 2009 sebesar 7,34% dan pada tahun 2010 rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan 11,57% dari tahun sebelumnya, karena berkurangnya penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah. Ini juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengalami penurunan pada periode 2009 – 2010 karena berkurangnya pendapatan lain lain yang sah. Namun pemerintah daerah cepat untuk bangkit kembali sehingga pertumbuhannya terus meningkat.

Peran serta pemerintah sangatlah penting dalam sebuah pertumbuhan daerahnya terutama pertumbuhan PAD, sebab pemerintah daerah yang memiliki hak untuk membuat peraturan hal apa saja yang bisa menjadi pajak daerah dalam sebuah peraturan daerah serta izin dari pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dapat menambah sumber PAD.

Rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan menurut Halim (2008).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa penelitian dari perhitungan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2008 – 2012 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian daerah dari kinerja keuangan dalam mengelola keuangan daerahnya rendah sekali. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan belum dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya, karena masih sangat rendah sekali dalam kemandirian disebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dibanding dengan transfer dari pemerintah Pusat dan Provinsi. Ini dapat dilihat dari perhitungan yang ada dari tahun 2008 sebesar 3.64%, tahun 2009 sebesar 6.49%, tahun 2010 sebesar 3.48%, tahun 2011 sebesar 3.85%, dan tahun 2012 sebesar 4.07%, sangat jauh dari standarisasi keuangan yang ada. Sehingga dapat di katakan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pusat.
2. Efektivitas dalam mengelola PAD Kabupaten Bengkulu Selatan, dilihat dari perhitungan rasio efektifitas yang dari tahun 2008 sebesar 105,3%, tahun 2009 sebesar 121,8%, tahun 2010 sebesar 73,9%, tahun 2011 sebesar 96,04%, dan pada tahun 2012 sebesar 128,9%. Yang berarti telah mencapai kriteria yang dapat dikatakan efektif.

3. Efisiensi dalam mengelola PAD Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dikatakan sangat efisien karena dari hasil penghitungan efisiensi PAD Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2008 berada di angka 4,72%. Pada tahun 2009 di angka 4,54%, pada tahun 2010 berada di angka 4,61%. Pada tahun 2011 di angka 4,94% dan pada tahun 2012 berada di angka 4,84%. Ini berarti Kabupaten Bengkulu Selatan mampu mencapai kriteria yang sangat efisien dan dilihat dari kemampuan Pemda dalam mengefisienkan PAD yang ada dengan mengikuti peraturan, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri dalam negeri No 35 Tahun 2002 yang menyatakan anggaran upah pungut untuk pajak daerah dan PBB, yaitu maksimal 5 persen.
4. Rasio pertumbuhan Pemkab Bengkulu Selatan dalam lima tahun selama periode 2008 – 2012 terdapat periode yang negatif, yaitu pada tahun 2009-2010 sebesar -46,03%. Adapun rasio pertumbuhan yang mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2009-2010 sebesar -46,03% naik menjadi 24,08% tahun 2010-2011, kemudian naik menjadi 28,15% pada tahun 2011-2012. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun menandakan semakin tumbuhnya perekonomian di daerah tersebut sehingga semakin banyak juga pemasukan yang di dapat oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bengkulu selatan.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat lebih mengoptimalkan sumber – sumber PAD yang belum maksimal realisasinya, seperti pada pajak retribusi daerah yaitu pada izin mendirikan bangunan serta izin retribusi tempat penginapan, dengan semakin banyaknya bangunan yang berdiri serta bertambahnya penginapan tentunya akan menambah jumlah PAD pada sektor tersebut dan pendapatan lain – lain yang sah yaitu penerimaan jasa giro yang setiap tahunnya realisasi pendapatannya tidak stabil. Yang menandakan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi memiliki pendapatan yang lebih besar lagi apabila dari kedua sumber PAD tersebut lebih dioptimalkan, ini menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat mencapai kategori sebagai daerah mandiri dan PAD yang didapat tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam pelayanan dan pembangunan didaerahnya.
2. Pemerintah Daerah kabupaten Bengkulu Selatan harus dapat meningkatkan lagi target PAD yang di dapat dari tahun sebelumnya, sebab target PAD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut masih terlalu kecil. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan harus dapat lebih tegas dalam menetapkan target PAD agar setiap tahunnya target PAD tersebut dapat terus meningkat sehingga kinerja pemerintah dapat lebih baik lagi dalam

mencapai target PAD tersebut. Dengan semakin meningkatnya PAD yang didapat oleh suatu daerah terlebih dapat melampaui target yang dicapai, membuktikan kinerja Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sangat efektif, apalagi apabila target dari penerimaan PAD tersebut dapat meningkat setiah tahunnya.

3. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan agar terus dapat memiliki kerjasama yang baik antara petugas yang berada di kecamatan dengan petugas yang berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam mempertahankan efisiensi atau biaya pungutan dari PAD agar semakin baiknya penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan pembangunan dengan meminimalisirkan biaya pungutan. Semakin kecil persentase upah pungut menandakan kinerja yang semakin baik pula.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan harus dapat meningkatkan lagi PAD yang didapat seperti dengan mencari lagi sumber – sumber PAD baru yang belum terjamah selama ini seperti dengan memberikan izin kepada perusahaan – perusahaan yang akan berinvestasi di Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga dapat menjadi pendapatan sekaligus keuntungan bagi Kabupaten Bengkulu Selatan apabila ada perusahaan asing yang berinvestasi di daerah tersebut, sehingga diharapkan PAD tersebut dapat terus tumbuh setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2012. *Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI, No.1.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Darsono dan Ashari. 2004. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: ANDI
- Fino, Losa Al. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Padang. UNAN
- Ghozali, Imam. 2009. *Analisis Multivariate Dengan SPSS*. Semarang : BP - UNDIP
- Hadi, Waksito. 2010. “*Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 Di Wilayah Provinsi Aceh*”, Jurnal telaah dan riset, Vol. 3. No. 1. Januari 2010, hal 29-51
- Halim, Abdul. 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi ketiga*. Jakarta: Salemba Empat
- Julitawati, Ebit, Darwanis, Jalaludin. 2012. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*”, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, tahun I, No. 1, Agustus 2012, hal 1-15
- Jusmawati, 2011, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Makasar, UNHAS*
- Kieso, Donald E., dkk. 2002. *Intermediate Accounting*. (Diterjemahkan Oleh: Gina Gania dan Ichsan Setiyo Budi). Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, Haryo. 2008. “*Variansi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Dki Jakarta*”, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Tahun I, No. 2. Agustus 2008, hal 126-143
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI

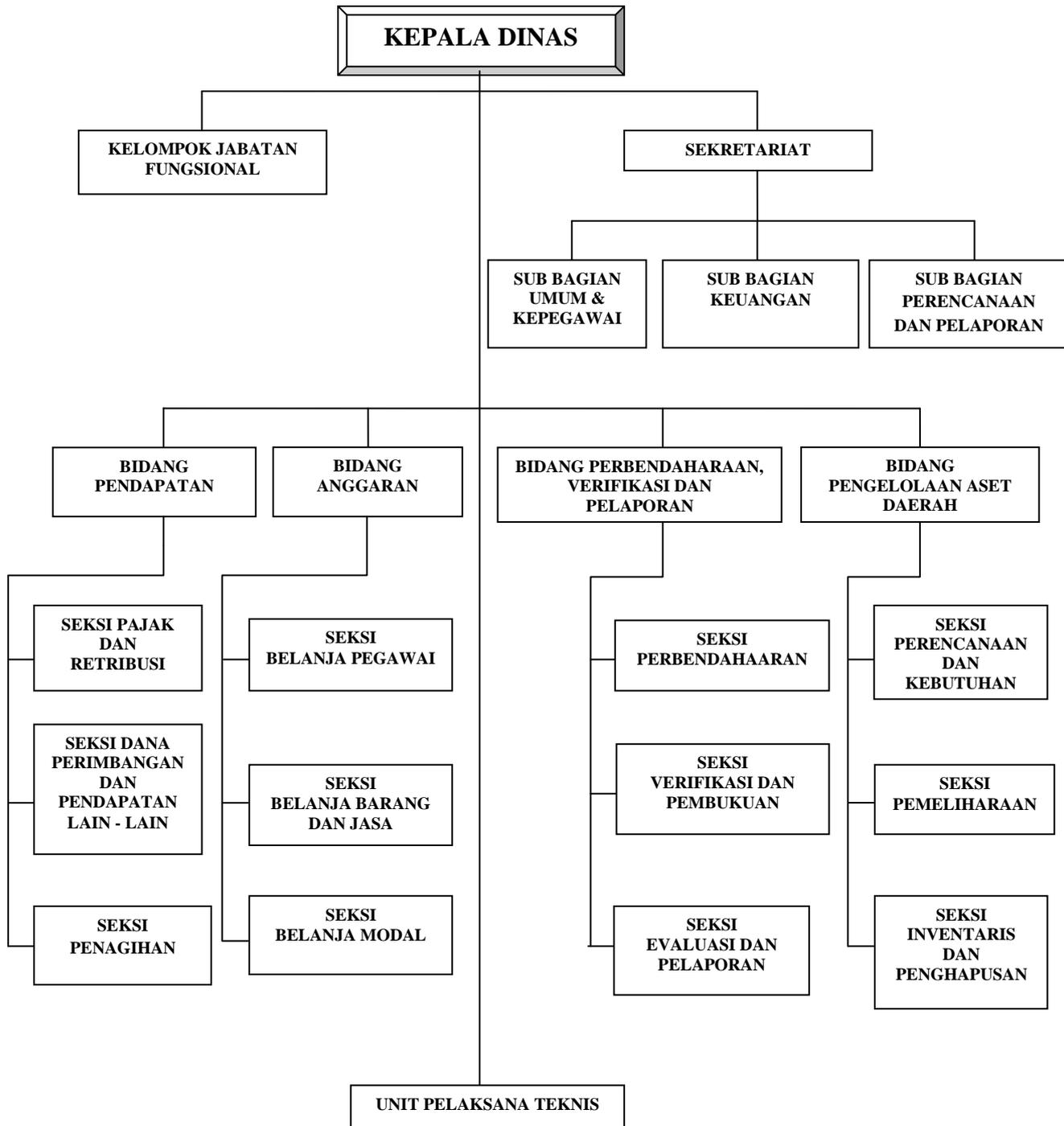
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Prasetya, Gede Edy. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rakyat Bengkulu. 2013, 13 Mei. *PAD 2012 Over Target*, hal.33
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak
- Republik Indonesia. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Rusherlistyanti. 2013. “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Seindonesia*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume. 12, Nomor 01, Maret 2013, hal 43 - 66
- Saftiana, Yulia, 2008, *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan*, Palembang, UNSRI
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Usman, 2011, *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo*, Gorontalo, UG

- Utomo, Warsito. 1997. *Peranan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yanti, 2011, *Analisis Rasio Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng*, Makasar, UNHAS

# LAMPIRAN

Lampiran 1

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



**Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah salah satu perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja DPPKAD berdasarkan Perda Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada lampiran. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri atas :

**1. Kepala Dinas**

- a. Perumusan kebijakan teknis dinas
- b. Penyusunan rencana strategik dinas
- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas.
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini kepala dinas Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencana strategik program kerja dinas sesuai dengan visi dan

misi daerah. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan juga Mengkoordinasikan penyusun dan pedoman pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), rancangan perubahan APBD dan sisa perhitungan APBD serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Sebagai kepala dinas berhak untuk mengarahkan, merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah., yang juga mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran.

## **2. Sekretariat**

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.
- b. Penyelenggaraan administrasi umum.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Adapun tugas sekretariat yaitu Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Mengelola dan mengkoordinasikan

pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan. Sekertariat terdiri dari:

1. Sub bagian umum dan kepegawaian

Mempunyai tugas Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan dan perpustakaan. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas.

2. Sub bagian perencanaan dan pelaporan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusun rencana kerja dinas. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas.

3. Sub bagian keuangan

Mempunyai tugas membuat rencana operasional program kerja sub bagian. Mempersiapkan bahan-bahan dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran dilingkungan dinas' sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Membuat daftar usulan kegiatan. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian.

## **5. Bidang Pendapatan**

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang PAD mempunyai tugas untuk merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian potensi PAD. Memberikan petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi dan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan pajak, retribusi daerah, pembinaan dan pengawasan, evaluasi pajak dan retribusi serta pungutan lainnya yang sah. Bidang Pendapatan terdiri dari :

- a. Seksi pajak dan retribusi

Memiliki tugas untuk menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Melaksanakan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah serta data potensi pajak daerah. Membuat

kebijakan bisnis pemungutan pajak daerah meliputi pendataan, penetapan penerimaan, penyetoran dan penagihan.

b. Seksi dana perimbangan dan pendapatan lain – lain

Bertugas menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan dana perimbangan. Merumuskan dan mengendalikan perimbangan keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan penggunaan anggaran pada perangkat daerah.

Seksi lain-lain pendapatan yang sah memiliki tugas Menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Membuat petunjuk teknis di bidang penerimaan dana perimbangan dana dan sumber-sumber lain yang sah. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## **6. Bidang Anggaran**

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bidang anggaran mempunyai tugas Merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan anggaran. Melaksanakan pengkajian kebijakan pengaplikasian anggaran daerah dan penyusunan APBD. Bidang anggaran terdiri dari:

1. Seksi Belanja Pegawai

Seksi belanja pegawai bertugas untuk menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Melaksanakan pengkajian kebijakan pegalokasian daerah. Menyiapkan bahan perumusan pedoman penyusunan APBD. Melaksanakan rekapitulasi dokumen anggran dan perubahan anggaran.

2. Seksi Belanja Barang Dan jasa

Seksi belanja barang dan jasa mempunyai tugas menyusun rencana sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas dalam membeli barang atau jasa yang di inginkan. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Seksi Belanja Modal

Seksi belanja modal bertugas untuk menyiapkan anggaran yang dibutuhkan dalam kebutuhan organisasi dalam mencapai kebutuhan

organisasi. Sehingga mendapatkan rumusan pengalokasian belanja yang ingin di butuhkan.

## **7. Bidang Perbendaharaan, Verifikasi Dan Pengelolaan**

- a. Penyusunan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perbendaharaan, verifikasi dan pengelolaan memiliki tugas untuk merencanakan kegiatan dan program sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Bidang perbendaharaan, verifikasi dan pengelolaan terdiri dari:

- a. Seksi Perbendaharaan

Seksi perbendaharaan mempunyai untuk menyusun rencana sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas perbendaharaan. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Seksi Verifikasi Dan Pembukuan

Seksi verifikasi dan pembukuan mempunyai tugas menyusun rencana program kerja dan kegiatan pembukuan dan verifikasi dan memantau pelaksanaannya. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Bidang. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya. Menyelenggarakan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pembayaran / penyeteroran pajak daerah. Melaksanakan pembukuan piutang pajak daerah. Melaksanakan penyelesaian restitusi, pindah buku, rekonsiliasi pajak daerah. Melaksanakan pembukuan dan verifikasi mengenai realisasi penerimaan dan piutang pajak Daerah. Menerima dan mencatat semua SKPD serta surat-surat ketetapan pajak daerah yang belum dibayar lunas dan yang telah dibayar lunas. Membuat daftar piutang pajak Daerah. Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Mencatat untuk dilakukan perhitungan kelebihan / kompensasi pembayaran pajak. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pembukuan dan verifikasi. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai

sebagai bahan peningkatan karir. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan evaluasi dan pelaporan dan memantau pelaksanaannya. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Bidang. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya. Mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan daerah. Menyusun laporan bulanan dan tahunan (realisasi PAD, Laporan Kinerja, Lakip). Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang evaluasi dan pelaporan. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas-tugas

kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

- a. Penyusunan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang aset mempunyai tugas merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan aset. Mengordinir inventarisasi aset daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Bidang pengelolaan aset terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Kebutuhan

Seksi Bidang Perencanaan Kebutuhan memiliki menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan perencanaan kebutuhan. Menyediakan bahan perencanaan dan pengadaan aset daerah. Membuat daftar rencana dan analisis kebutuhan aset daerah.

b. Seksi Pemeliharaan

Seksi pemeliharaan memiliki tugas untuk menyusun rencana kerja, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pemeliharaan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan

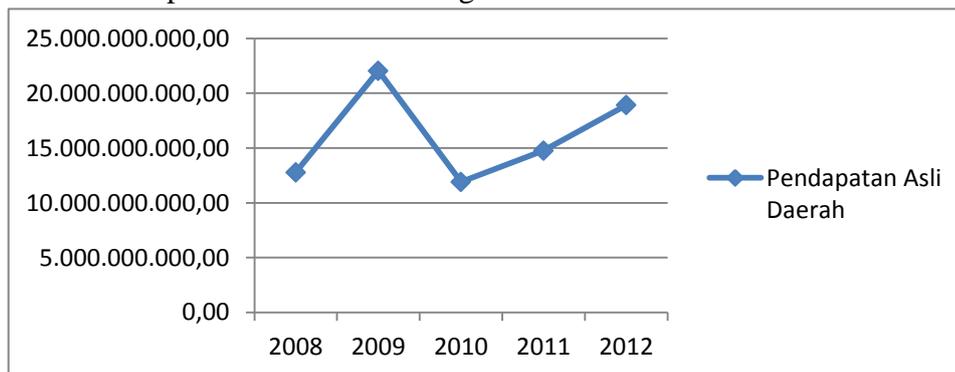
Seksi investaris dan penghapusan bertugas untuk menyusun rencana kerja, menyusun bahan kebijakan standar pengelolaan aset daerah, melaksanakan pengawasan pemanfaatan aset daerah. Melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, penyimpanan, pendistribusian aset daerah, melakukan inventarisasi aset daerah, melaksanakan legal audit aset daerah, menyusun daftar inventaris aset daerah, menyusun data dasar neraca aset daerah, menyusun dokumen, prosedur dan melaksanakan penghapusan aset daerah, menyimpan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan aset daerah, melaksanakan perawatan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pemeliharaan, distribusi dan penghapusan aset, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Lampiran 2

Pendapatan Asli Daerah Periode Tahun 2008 – 2012

Tahun	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2008	12.773.550.187,50
2009	22.042.030.166,95
2010	11.894.036.693,62
2011	14.758.401.174,70
2012	18.911.016.577,54

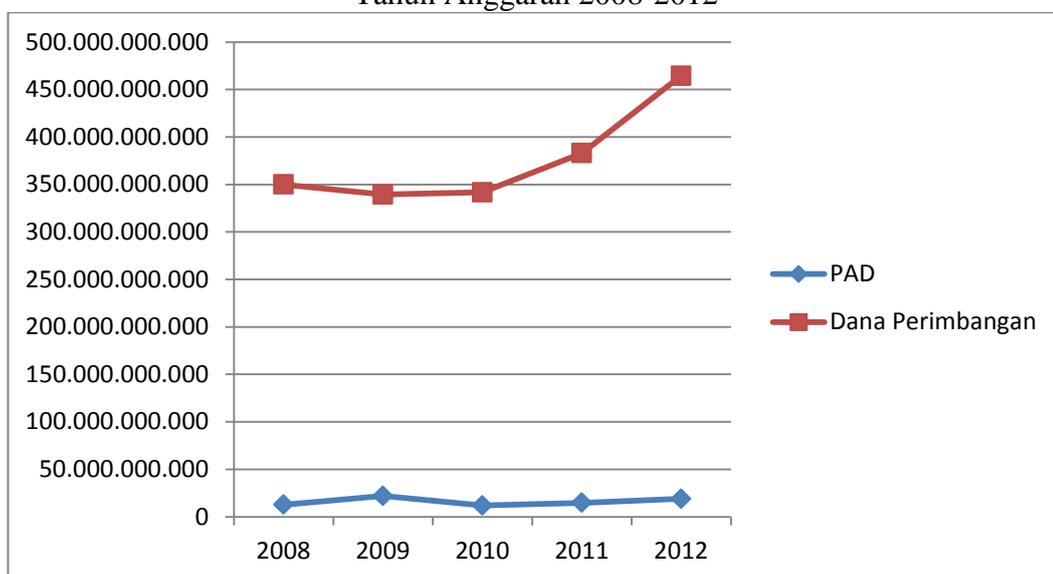
Pendapatan Asli Daerah Bengkulu Selatan Tahun 2008 - 2012



Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2008-2012

Keterangan / Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian
2008	12.773.550.187,50	350.017.783.050,00	3.65%
2009	22.042.030.166,95	339.328.028.084,00	6.50%
2010	11.894.036.693,62	341.655.587.953,00	3.48%
2011	14.758.401.174,70	382.925.770.693,00	3.85%
2012	18.911.016.577,54	464.456.933.976,00	4.07%

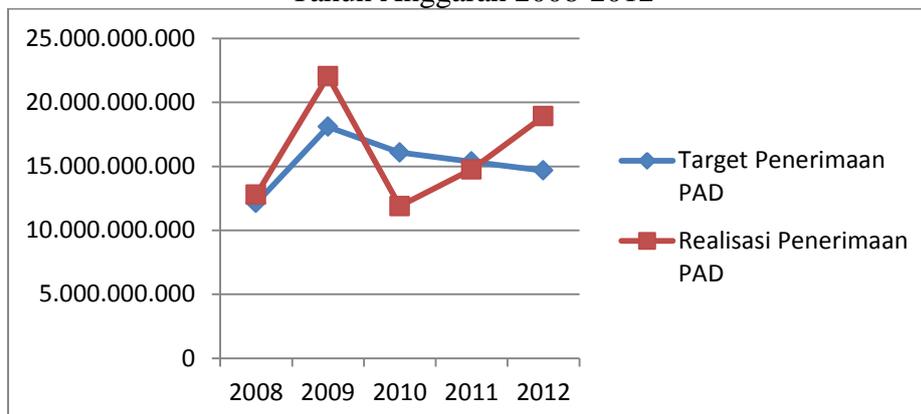
Grafik Kemandirian Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tahun Anggaran 2008-2012



Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun Anggaran 2008-2012

Keterangan Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas
2008	12.124.890.765,00	12.773.550.718,50	<b>105,35%</b>
2009	18.084.688.988,00	22.042.030.166,95	<b>121,88%</b>
2010	16.080.433.967,00	11.894.036.693,62	<b>73,97%</b>
2011	15.366.203.760,00	14.758.401.174,70	<b>96,04%</b>
2012	14.669.257.351,56	18.911.016.577,54	<b>128,92%</b>

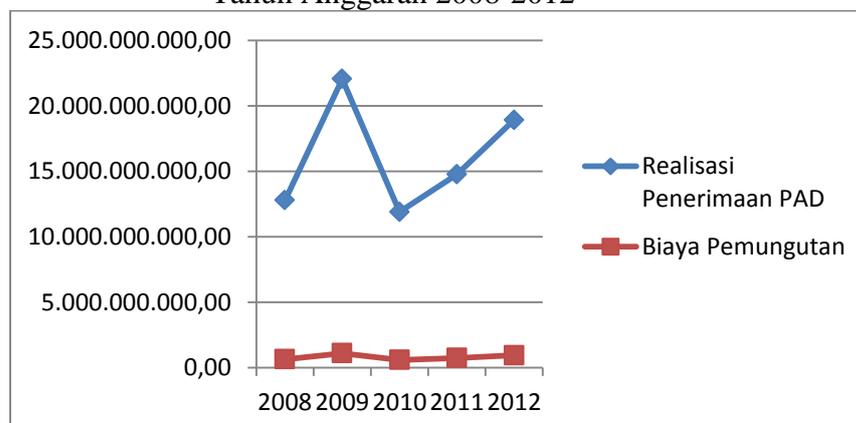
Grafik Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun Anggaran 2008-2012



Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun Anggaran 2008-2012

Keterangan Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Biaya Pemungutan PAD	Rasio Efisiensi
2008	12.773.550.718,50	603.677.535,92	4,72%
2009	22.042.030.166,95	1.001.102.508,34	4,54%
2010	11.894.036.693,62	549.107.438,68	4,61%
2011	14.758.401.174,70	730.290.058,74	4,94%
2012	18.911.016.577,54	915.505.828,88	4,84%

Grafik Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun Anggaran 2008-2012



Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tahun Anggaran 2008-2012

<b>Keterangan Tahun</b>	<b>PAD<sub>t0</sub></b>	<b>PAD<sub>t1</sub></b>	<b>Rasio Pertumbuhan</b>
2008-2009	12.773.550.718,50	22.042.030.166,95	<b>72,56%</b>
2009-2010	22.042.030.166,95	11.894.036.693,62	<b>-46,04%</b>
2010-2011	11.894.036.693,62	14.758.401.174,70	<b>24,08%</b>
2011-2012	14.758.401.174,70	18.911.016.577,90	<b>28,14%</b>